

# PENGARUH KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN

<sup>1)</sup>Mochamad Taufan Noor <sup>2)</sup>Fidiana <sup>3)</sup>Nur Handayani

Email: <sup>1)</sup>[mtaufannoor@gmail.com](mailto:mtaufannoor@gmail.com)

<sup>2)</sup>[fidiana@stiesia.ac.id](mailto:fidiana@stiesia.ac.id)

<sup>3)</sup>[nurhandayani@stiesia.ac.id](mailto:nurhandayani@stiesia.ac.id)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarakan langsung kepada responden yaitu Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang menerima delegasi wewenang dan tanggung jawab untuk terlibat dalam Pembuatan Laporan Keuangan yang ada di 32 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Dalam hal ini populasi penelitian adalah di setiap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dalam penyusunan perencanaan anggaran serta berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 56. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur Sipil Negara berpengaruh secara positif terhadap Akuntabilitas Keuangan. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya Kompetensi Aparatur Sipil Negara akan meningkatnya juga Akuntabilitas Keuangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah akan meningkatnya juga Akuntabilitas Keuangan. Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya Sistem Informasi Keuangan Daerah akan meningkatnya juga

Akuntabilitas Keuangan.

## Kata kunci:

Akuntabilitas Keuangan, Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Keuangan Daerah

## PENDAHULUAN

Kehidupan berbagai negara di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia reformasi birokrasi adalah perubahan besar dan mendasar dalam paradigma baru dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Salah satu paradigma baru dan tata kelola pemerintah yang berkembang saat ini adalah akuntabilitas publik. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada stakeholder pemerintah yang memiliki kepentingan terhadap setiap pelaporan keuangan (Adriani, 2010). Akuntabilitas publik merupakan bentuk kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Menurut Nurmuthmainnah (2015) akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak/ berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Proses akuntabilitas publik ternyata mengalami perjalanan yang sangat panjang. Hal ini dibuktikan dengan terwujudnya sebuah akuntabilitas publik yang pada masyarakat kemudian ke tujuan pada parlemen, menteri, pengadilan serta ombudsman baru ke arah masyarakat. Pada fenomena ini akan terjadi pada perkembangan sektor publik yang ada

di Indonesia yaitu dengan menguatnya sebuah tuntutan menjadi akuntabilitas atas setiap lembaga publik, baik yang ada di daerah maupun pusat (Mardiasmo, 2006). Akuntabilitas terkait keuangan daerah memiliki fungsi yang begitu besar dalam pengambilan keputusan yang tepat bagi stakeholder. Atas dasar hal tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan harus dapat disajikan secara jujur dan sesuai dengan standar pelaporan yang ada agar setiap akun yang dilaporkan tidak menyesatkan pengguna informasi keuangan tersebut.

Informasi atas laporan keuangan akan dapat bermanfaat bagi stakeholder apabila informasi tersebut dapat dipahami dan digunakan untuk proses pengambilan keputusan. Selain itu, informasi atas laporan keuangan tersebut benar-benar dapat dipercaya oleh stakeholder (Adriani, 2010). Artinya informasi keuangan tersebut benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi dan andal. Informasi atas laporan keuangan ini harus memenuhi unsur karakteristik kualitatif laporan keuangan yang tertuang di dalam kerangka konseptual akuntansi yang ada di pemerintahan dengan mempergunakan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 yang menjabarkan mengenai ukuran-ukuran normatif yang diwujudkan dalam informasi akuntansi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan. Karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki adalah relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Keempat unsur karakteristik kualitatif laporan keuangan ini wajib dilaksanakan agar akuntabilitas laporan keuangan dapat diterima.

Pada saat sekarang ini, banyak permasalahan terkait dengan akuntabilitas atas laporan keuangan daerah. Berdasarkan hasil kajian Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) (2017) terkait dengan penerapan SAP Akruar oleh pemerintah daerah diketahui bahwa penerapan SAP Akruar oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya dijalankan secara efektif. Hal ini sejalan dengan pendapat BPK

atas kesiapan pemerintah daerah dalam pelaporan keuangan berbasis akrual. Hal tersebut disebabkan oleh adanya permasalahan terkait dengan kebijakan, teknologi informasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung laporan keuangan berbasis akrual. Selanjutnya, berdasarkan hasil kajian PKAKN diperoleh informasi bahwa Iktisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS) I Tahun 2016 BPK mengungkapkan bahwa dari 533 LKPD Tahun 2015, sebanyak 31 (6%) LKPD memperoleh opini WTP dimana 51% atau 16 LKPD yang memperoleh opini TMP tersebut berada di Indonesia bagian timur (Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat). Bahkan 14 dari 16 LKPD memperoleh opini TMP selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh PKAKN tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan belum seluruhnya memenuhi unsur karakteristik kualitatif laporan keuangan sehingga akuntabilitas laporan keuangan masih rendah. Hal tersebut disebabkan oleh adanya permasalahan terkait dengan kebijakan, teknologi informasi dan Sumber Daya Manusia (SDM). Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini sangat menarik untuk dikaji kembali dalam topik akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan menguji unsur Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

Salah satu cara efektif yang dapat mendorong percepatan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan *good governance* dan peningkatan akuntabilitas untuk pengelolaan keuangan daerah adalah Pengembangan Aparatur Sipil Negara yang dalam hal ini telah diamanatkan Undang-undang kepada Lembaga Administrasi Negara (LAN) terdapat pada UU No 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur tentang pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. Pada Pasal 70 ayat (1) disebutkan bahwa setiap pegawai

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi tersebut salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan. Pada masa orientasi atau percobaan Pegawai Negeri Sipil, proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral dan kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidangnya (Febrianto, 2016).

Salah satu pilar dalam program untuk reformasi ini yaitu dengan peningkatan sebuah manajemen SDM yang dimaksudkan agar Pemerintah Daerah kedepannya mempunyai sebuah SDM yang bisa profesional serta bertanggung jawab supaya bisa sebagai peningkatan efisiensi serta efektivitas pelayanan pada masyarakat. Prinsip pada manajemen SDM yaitu peningkatan pada kualitas, penempatan pada SDM supaya bisa kompeten pada setiap tempat dan waktu yang sesuai, serta sistem pola sebuah karir yang jelas, pengelolaan SDM yang mempunyai basis kompetensi, kecepatan dalam menyajikan sebuah informasi, serta keakuratan. SDM juga harus menguasai teknologi informasi (TI) demi mencapai tujuan organisasi. Penerapan teknologi informasi pada tiap entitas baik sektor swasta maupun pemerintahan tentunya memiliki tujuan yang berbeda karena penerapan TI pada suatu organisasi adalah untuk mendukung kepentingan usahanya. TI mempunyai manfaat atau kemudahan bagi seseorang dalam menghemat waktu maupun tenaga (Rahadi, 2007). Didalam *Decision-Usefulness Theory* (Syam, 2015) bahwa nilai informasi yang tidak didukung dengan pemanfaatan teknologi, akan menghambat dalam memenuhi karakteristik kualitatif berupa ketepatanwaktuan dan juga dalam rangka pengambilan keputusan. Kewajiban dalam pemanfaatan sebuah teknologi informasi pada Pemerintah serta Pemerintah Daerah yang sudah diatur dalam PP No. 65 Tahun 2010 mengenai Sistem Informasi Keuangan Daerah mengalami perubahan pada PP No.

56 Tahun 2005 mengenai Sistem Informasi Keuangan Daerah yang pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 mengenai Informasi Keuangan Daerah. Pemerintah sudah melakukan upayanya dalam sebuah penyusunan laporan berdasarkan sistem akuntansi keuangan daerah, sehingga mendapatkan peningkatan sebuah kualitas yang bisa didapatkan laporan keuangan daerah tersebut. Namun kenyataannya tidak semua pegawai di pemerintahan memahami teknologi dan sistem akuntansi keuangan daerah tersebut. Adapun yang menjadi tujuan dari adanya teknologi informasi untuk memecahkan masalah, membuka kreativitas, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan (Sutarman, 2009 dalam Ramadhan, 2015). Pengelolaan keuangan yang baik harus dikelola oleh SDM yang berkompoten dan menguasai teknologi informasi. Untuk mencapai hal tersebut maka suatu instansi pemerintah membutuhkan suatu sistem pengendalian inten yang kuat.

Berdasarkan PP No 60 Tahun 2008 yang menyatakan sebuah pengendalian internal bisa meliputi dalam berbagai kebijakan seperti, (1) terkait pada catatan keuangan, (2) memberikan sebuah keyakinan bisa memadai bahwa laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan SAP, penerimaan serta pengeluaran sudah sesuai dengan otorisasi yang bisa memadai, (3) memberikan sebuah keyakinan bisa memadai pada keamanan untuk aset yang mempunyai dampak pada material laporan keuangan di pemerintahan (Armando, 2013). BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam meneliti kewajaran laporan keuangan menggunakan pengendalian intern sebagai salah satu Kriteria (Hardyansyah, 2016). Pemanfaatan teknologi yang ada pada lingkungan pemerintah bisa dilihat dengan sebuah penerapan *electronic-government*. Di Indonesia, pemerintahan mulai menyadari akan pentingnya sebuah pelayanan publik secara online serta bisa mengembangkan sebuah *electronicgovernment* pada keseluruhan jajarannya sehingga dikeluarkannya sebuah Inpres No. 3 Tahun 2003 mengenai pada pengembangan *e-Government*. Pada pemerintahan untuk penerapan sistem informasi menjadi penting

untuk mewujudkan *good governance* supaya bisa sebagai peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat serta stakeholder di pemerintahan. Konsep pada sistem informasi yang dipergunakan yaitu pada sistem yang mempunyai integrasi dalam mewujudkan sebuah transparansi, akuntabilitas serta pengelolaan keuangan daerah. Menurut PP No. 56 Tahun 2005 pasal 1 Sistem Informasi Keuangan Daerah atau dinamakan dengan SIKD sebuah sistem sebagai pendokumentasian, pengadministrasian, serta pengolahan data keuangan daerah serta data lainnya supaya bisa sebagai informasi yang akan disajikan pada masyarakat sebagai pengambilan keputusan pada sebuah pelaksanaan, perencanaan, serta pelaporan pertanggungjawaban pada pemerintah daerah. Menurut Bastian (2002) sebuah pengimplementasian pada SIKD ditujukan sebagai pengelolaan ola dana secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Implementasi SIKD bisa sebagai peningkatan dalam penggunaan sebuah sistem serta peningkatan pada kinerja aparat pemerintah daerah pada sebuah pemenuhan tuntutan masyarakat sehingga bisa menyadari pentingnya sebuah transparansi dan akuntabilitas pada setiap lembaga sektor publik. Penelitian yang dilakukan oleh Sudaryanti (2013) mengatakan penganggaran berpengaruh secara pada kinerja melalui SIKD. Implementasi melalui sistem akuntansi pemerintahan dan implementasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh pada fungsi pengawasan internal (Abdul R., 2009). Hasil ini akan berindikasi mengenai implementasi sebuah sistem akuntansi, sistem pengelolaan keuangan daerah, serta fungsi pengawasan internal mempunyai pengaruh pada kinerja pemerintah daerah (Dyastiarini, 2015). Salah satu bentuk konkret dalam terwujudnya sebuah akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara / Daerah yaitu pada penyampaian sebuah laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pada prinsip yang tepat waktu dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan secara umum. Hal tersebut diatur pada UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang yang mengatur akuntabilitas

sektor publik mengalami perubahan yang mendasar, pada penekanan peranan sistem akuntansi di sebuah pengukuran dan evaluasi baik kinerja keuangan atau pelayanan, mendorong pada pengungkapan dan sebuah komunikasi pada hasil yang ditujukan kepada stakeholders (Steccolini, 2002). Sebagai konsekuensinya, di setiap Negara yang berbeda akan melaporkan secara eksternal yang sedang ditransformasikan supaya bisa konsisten sesuai kebutuhan akuntabilitas baru (Nurmuthmainnah, 2015).

Penelitian terkait topik Akuntabilitas dengan variabel Kompetensi ASN, SPIP dan Pemanfaatan SIKD telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu, yaitu Andriani (2010), Sinarwati (2014), Darmawan (2014), Saleba (2014), Nurmuthmainnah (2015), Komarasari (2016), Hardyansyah (2016), Dharmaningtyas (2016), Utomo (2017), Rianisanti (2017). Berhubungan dengan pengaruh Kompetensi ASN (SDM), Andriani (2010) dalam penelitiannya membuktikan bahwa kapasitas SDM berpengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa nilai informasi akan andal jika memiliki SDM yang mendukung. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hardyansyah (2016), Rianisanti (2017), dan Utomo (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh pada kualitas laporan keuangan. Namun penelitian Komarasari (2016) mengatakan bahwa kapasitas SDM tidak berpengaruh terhadap keterandalan keuangan pemerintah daerah.

Terkait pengaruh SPIP terhadap Akuntabilitas keuangan daerah, Dharmaningtyas (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa Efektivitas Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan secara positif pada Akuntabilitas Keuangan. Hasil penelitian mendukung Saleba (2014) yang mengatakan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh pada sebuah efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Bawono dan Purbasari (2017) dan Darmawan (2014) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan. Selanjutnya, terkait dengan Pemanfaatan

SIKD, Sinarwati (2014) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah daerah. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rianisanti (2017) yang menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Meskipun telah beberapa kali dilakukan penelitian terkait topik akuntabilitas dari variabel Kompetensi ASN (SDM), SPIP dan SIKD, namun hasil yang diperoleh masih memberikan kesimpulan yang berbeda-beda dan belum konsisten. Oleh karena itu maka penelitian ini menarik untuk dikaji kembali dengan judul pengaruh Kompetensi ASN, SPIP dan SIKD terhadap Akuntabilitas Daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sinarwati (2014), Darmawan (2014), Saleba (2014). Penelitian ini mengadopsi kembali variabel SDM (Kompetensi ASN), SPIP dan pemanfaatan SIKD untuk menguji pengaruhnya terhadap Akuntabilitas Keuangan. Penelitian ini dilakukan pada 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik merupakan Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur yang dikenal dengan sebagai kota tempat berdirinya pabrik semen dan pabrik petrokimia pertama di Indonesia. Kabupaten Gresik merupakan salah satu penyangga utama Kota Surabaya dan termasuk dalam kawasan Gerbangkertosusila. Dari uraian latar belakang telah diuraikan diatas penulis membuat perumusan masalah dalam penelitian adalah: (1) Apakah kompetensi ASN berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan; (2) Apakah SPIP berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan; (3) Apakah SIKD berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan.

## LANDASAN TEORI

Teori keagenan (*Agency Theory*) sebuah teori yang menjelaskan hubungan *principal* sebagai pihak pertama dengan *agent* sebagai pihak lainnya yang terikat kontrak

perjanjian. Teori prinsipal-agen menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang (Abdulah dan Halim, 2006 dalam Asmara. J.A. 2010).

Teori keagenan bisa diterapkan pada organisasi publik (Lane, 2003). Penerapan teori keagenan pada sektor publik ini sangat penting dilaksanakan agar dapat menganalisa berbagai komitmen untuk kebijakan yang berkaitan dengan publik yang terkait pada permasalahan yang kontraktual, yakni mengenai informasi tidak simetris (*asymmetric information*), *moral hazard*, dan *adverse selection* (Abdulah dan Halim, 2006). Organisasi sektor publik yang berkaitan dengan teori agensi ini adalah pemerintah daerah (eksekutif/agen) dengan DPRD (legislatif/principal) (Halim, 2007) sebagai bagian dari perwakilan masyarakat (publik). Disini agen merupakan eksekutif yang memperoleh amanat dari principal yaitu legislatif.

Implikasi teori ini terhadap penelitian ini adalah Akuntabilitas publik yang merupakan bentuk kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan terkait dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam sebuah pertanggungjawaban kepada pihak *principal* yang mempunyai hak serta kewenangan dalam sebuah pertanggungjawaban tersebut.

## Pengaruh Kompetensi ASN Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Mendefinisikan Wibowo (2013) kompetensi sebagai suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Hal senada diungkapkan oleh Spencer dan Spencer dalam Wibowo

(2011) mengatakan kompetensi sebuah landasan dasar karakteristik pada setiap seseorang serta mengindikasikan cara perilaku atau berpikir, menyamakan sebuah situasi, dan mendukung untuk periode waktu cukup lama. Kompetensi ASN berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia yang memiliki arti bahwa setiap personal ASN merupakan pribadi yang siap, mau dan mampu dalam memberikan berbagai ide keilmuan untuk pencapaian tujuan organisasi. Ide keilmuan ini berasal dari tiga aspek yaitu pendidikan, pengalaman dan pelatihan. Kompetensi sumber daya manusia ASN adalah kemampuan seorang individu pada suatu organisasi atau suatu sistem yang digunakan untuk dapat melaksanakan berbagai tugas yang menjadi kewenangannya untuk mencapai kinerja. Terkait dengan penelitian ini, kinerja yang dimaksud adalah terkait akuntabilitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah. Ketika kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap ASN baik maka akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah dapat tercapai. Andriani (2010) menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hardyansyah (2016), Rianisanti (2017), dan Utomo (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berikut ini hipotesisnya:

H1 : Kompetensi ASN berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan.

### **Pengaruh SPIP Terhadap Akuntabilitas Keuangan**

Undang - undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya Sistem Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan

pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut (Pertiwi, 2016). SPIP memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah. Ketika SPIP dapat dilaksanakan dengan baik, maka setiap proses terkait pelaporan keuangan pada pemerintah daerah dapat terlaksanakan dengan baik. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah dapat membuat laporan keuangan daerahnya lebih berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Hal ini juga dapat meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah. Namun, jika SPIP pada pemerintah daerah tidak dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada, maka pelaporan keuangan yang dihasilkan tidak dapat memberikan kualitas pelaporan yang baik dan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah akan menurun. Terkait pengaruh SPIP terhadap Akuntabilitas pelaporan keuangan daerah, Dharmaningtyas (2016) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa Efektivitas Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Saleba (2014) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Bawono dan Purbasari (2017) dan Darmawan (2014) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan. Berdasarkan uraian dan

hasil penelitian tersebut maka perumusan hipotesis adalah sebagai berikut:

H2 : SPIP berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan.

### **Pengaruh SIKD terhadap Akuntabilitas Keuangan**

Pemerintah daerah sebuah organisasi publik sehingga perlu adanya dukungan pada sistem informasi akuntansi supaya bisa berjalan secara efektif, bersih, efisien, serta transparansi sehingga bisa dipergunakan dalam pengendalian sebuah keputusan. Pemanfaatan pada sistem informasi akuntansi keuangan daerah dipengelolaan keuangan daerah dilaksanakan pada sebuah pemanfaatan program informasi teknologi dalam mendukung sistem informasi keuangan daerah (Rianisanti, 2017). SIKD sangat penting di dalam pengelolaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemanfaatan SIKD untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi. Selain itu, Berdasarkan PP No 65 tahun 2010 mengatakan SIKD sebuah sistem pendokumentasian, pengadministrasian serta pengolahan data pengelolaan keuangan daerah serta bisa sebagai informasi yang disajikan pada masyarakat yang bisa dipergunakan pengambilan keputusan pada sebuah pelaksanaan, perencanaan, dan pelaporan pada pertanggungjawaban pemerintah daerah. Sedangkan Informasi Keuangan Daerah merupakan segala informasi yang berhubungan dengan keuangan daerah sehingga memerlukan sebuah penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Rianisanti, 2017). Ketika SIKD dapat dilaksanakan dan dijalankan dengan baik maka hal ini dapat meningkatkan kualitas pelaporan dan akuntabilitas keuangan daerah. Sinarwati (2014) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah daerah. Berikut ini hipotesisnya:

H3 : SIKD berpengaruh positif terhadap

Akuntabilitas Keuangan.

### **Kerangka Konsep Penelitian**

Pada penelitian ini akuntabilitas akan dikaji berdasarkan pada Kompetensi ASN, SPIP dan SIKD. Menurut Wibowo (2013) merupakan sebuah kemampuan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan serta tugas yang dilandasi pada sebuah keterampilan dan pengetahuan yang akan mendukung pada sikap kerja supaya bisa dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi sumber daya manusia ASN adalah kemampuan seorang individu pada suatu organisasi atau suatu sistem yang digunakan untuk dapat melaksanakan berbagai tugas yang menjadi kewenangannya untuk mencapai kinerja. Terkait dengan penelitian ini, kinerja yang dimaksud adalah terkait akuntabilitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah. Ketika kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap ASN baik maka akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah dapat tercapai. Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya Sistem Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Kegiatan pengendalian ini dilakukan dalam suatu konsep SPIP. SPIP memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah. Ketika SPIP dapat dilaksanakan dengan baik, maka setiap proses terkait pelaporan keuangan pada pemerintah daerah dapat terlaksanakan dengan baik. SIKD merupakan sistem yang terkait dengan informasi pengelolaan keuangan daerah. SIKD sangat penting di dalam pengelolaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemanfaatan SIKD akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada sebuah pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kerangka dan model penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 1.**  
**Model Penelitian**

## METODOLOGI PENELITIAN

### Populasi Dan Sampel Penelitian

Gambaran Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek/obyek uang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang menerima delegasi wewenang dan tanggung jawab untuk terlibat dalam *Pembuatan Laporan Keuangan* yang ada di 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Gresik. Dalam hal ini populasi penelitian adalah di setiap OPD Kabupaten Gresik dalam *penyusunan perencanaan anggaran* serta berkaitan dengan *penyusunan laporan keuangan*. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 56.

### Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dipergunakan yaitu data primer dengan pendekatan survei lapangan menggunakan kuesioner. Data dikumpulkan dengan cara melakukan penyebaran kuesioner secara langsung pada para responden yang menjadi objek penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk

memperoleh data dari jawaban responden. Kuesioner ini digunakan untuk memperoleh data mengenai kompetensi ASN, SPIP Dan SIKD Terhadap Akuntabilitas Keuangan.

Teknik pengukuran yang dipergunakan untuk mengubah data kualitatif dari kuisisioner menjadi suatu urutan data kuantitatif adalah skala likert. Skala *likert* merupakan teknik penskalaan untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi seseorang tentang dirinya atau kelompoknya atau sekelompok orang yang berhubungan dengan suatu hal.

Ukuran yang dipergunakan dalam menilai sebuah jawaban-jawaban yang diberikan dalam menguji variabel independen dan variabel dependen yaitu lima tingkatan, bergerak dari satu sampai lima. Untuk pernyataan positif alternatif jawaban sebagai berikut : (1) Skor 5 untuk jawaban Sangat Setuju (SS); (2) Skor 4 untuk jawaban Setuju (S); (3) Skor 3 untuk jawaban Kurang Setuju (KS); (4) Skor 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS); (5) Skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS)

### Definisi Operasional

Pada bagian ini peneliti menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional variabel yang digunakan. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Pada bagian ini peneliti menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional variabel yang digunakan. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari

independen yang diteliti dalam penelitian ini adalah Kompetensi ASN, SPIP dan SIKD. Variabel dependen yang diteliti dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Keuangan (AK).

### 1. Kompetensi

Kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut (Wibowo, 2013). Pengukuran variabel Kompetensi ASN menggunakan beberapa indikator (Indrawati, 2017) yaitu : a. Pengetahuan; b.keterampilan; c.sikap.

### 2. SPIP

SPIP mempunyai tujuan dalam sebuah keyakinan supaya bisa memadai sehingga bisa tercapainya efektivitas serta efisiensi dalam pencapaian sebuah tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan. Pengukuran variabel SPIP menggunakan beberapa indikator (PP No. 60 Tahun 2008). (Asriani, 2017) yaitu: a.Lingkungan; b.pengendalian; c.penilaian resiko; d.kegiatan Pengendalian e. informasi dan komunikasi f.pemantauan Pengendalian Intern.

### 3. SIKD

Berdasarkan PP No 65 tahun 2010 mengatakan SIKD sebuah sistem penndokumentasikan, pengadministrasikan serta pengolahan data pengelolaan keuangan daerah serta bisa sebagai informasi yang disajikan pada masyarakat yang bisa dipergunakan pengambilan keputusan pada sebuah pelaksanaan, perencanaan, dan pelaporan pada pertanggungjawaban pemerintah daerah. Sedangkan Informasi Keuangan Daerah merupakan segala informasi yang berhubungan dengan keuangan daerah sehingga memerlukan sebuah penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Rianisanti, 2017). Pengukuran variabel SIKD menggunakan beberapa

indikator (Siahaan, 2017) yaitu : a. Kemudahan Penggunaan SIKD; b.kegunaan SIKD

### 4. Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Akuntabilitas sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Pengukuran variabel AK menggunakan beberapa indikator (Nurmuthmainnah, 2015) yaitu: a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum; b. Akuntabilitas Proses; c. Akuntabilitas Program; d. Akuntabilitas Kebijakan.

### Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa digunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan. Untuk mengelola data tersebut dapat menggunakan alat statistik berupa perangkat lunak statistik yang dikenal dengan SPSS 22. Pada bagian ini peneliti menguraikan tentang teknik yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini. Teknik analisa data yang digunakan di dalam penelitian ini berupa statistik deskriptif dan statistik inferensial.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Umur Responden

**Tabel 1**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Umur**

Umur	Frekuensi	Persentase (%)
26-35 Tahun	7	12.5 %
36-45 Tahun	12	21.4 %
46-55 Tahun	32	57.1 %
56-65 Tahun	5	8.9 %
Total	56	100 %

(Sumber: Data primer tahun 2019, diolah)

Dari hasil 56 responden yang tersebar dapat terlihat dari kuesioner yang di isi

sebanyak 7 responden dari umur 26-35 Tahun, 12 responden dari umur 36-45 Tahun, 32 responden dari umur 46-55 Tahun, dan 5 responden dari umur 56-65 Tahun. Sehingga dapat disimpulkan pengisian terbanyak pada umur 46-55 Tahun.

### Jenis Kelamin Responden

**Tabel 2**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	25	44.6 %
Perempuan	31	55.4 %
Total	56	100 %

(Sumber: Data primer tahun 2019, diolah)

Dari hasil 56 responden yang tersebar dapat terlihat dari kuesioner yang di isi sebanyak 25 responden dari jenis kelamin laki-laki dan 31 responden dari jenis kelamin perempuan. Sehingga dapat disimpulkan pengisian terbanyak pada jenis kelamin perempuan.

### Pendidikan Responden

**Tabel 3**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan**

Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
S1	47	83.9 %
S2	9	16.1 %
Total	56	100 %

(Sumber: Data primer tahun 2019, diolah)

Dari hasil 56 responden yang tersebar dapat terlihat dari kuesioner yang di isi sebanyak 47 responden dari S1 dan 9 responden dari S2. Sehingga dapat disimpulkan pengisian terbanyak pada pendidikan S1.

### Jabatan Responden

**Tabel 4**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan**

Jabatan	Frekuensi	Persentase (%)
Perencanaan Program Keuangan	24	42.9 %
Perencanaan Program dan Keuangan	8	14.3 %
Total	56	100 %

(Sumber: Data primer tahun 2019, diolah)

Dari hasil 56 responden yang tersebar dapat terlihat dari kuesioner yang di isi sebanyak 24 responden dari jabatan perencanaan program, 24 responden dari jabatan keuangan, dan 8 responden dari jabatan yang merangkap pada perencanaan program dan keuangan. Sehingga dapat disimpulkan pengisian terbanyak pada jabatan perencanaan program dan keuangan.

### Lama Bekerja Responden

**Tabel 5**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja**

Lama Bekerja	Frekuensi	Persentase (%)
<1 Tahun	19	33.9 %
1-5 Tahun	26	46.4 %
6-10 Tahun	10	17.9 %
>10 Tahun	1	1.8 %
Total	56	100 %

(Sumber: Data primer tahun 2019, diolah)

Dari hasil 56 responden yang tersebar dapat terlihat dari kuesioner yang di isi sebanyak 19 responden dari lama bekerja kurang dari 1 Tahun, 26 responden dari lama bekerja mulai 1 sampai 5 Tahun, 10 responden dari lama bekerja mulai 6 sampai 10 Tahun, 1 responden dari lama bekerja lebih dari 10 Tahun. Sehingga dapat disimpulkan pengisian terbanyak pada lama bekerja mulai 1 sampai 5 Tahun.

Tempat Bekerja Responden

Tabel 6  
Karakteristik Responden Berdasarkan Tempat Bekerja

Tempat Bekerja	Frekuensi	Persentase (%)
Sekretariat Daerah	2	3.6 %
Sekretariat DPRD	2	3.6 %
Inspektorat Kabupaten	2	3.6 %
Dinas Pendidikan	2	3.6 %
RSUD	2	3.6 %
DPU dan Tata Ruang	2	3.6 %
DPKP	2	3.6 %
Satuan Polisi PP	1	1.8 %
Dinas Sosial	2	3.6 %
Dinas Tenaga Kerja	2	3.6 %
Dinas Lingkungan Hidup	2	3.6 %
DISPENDUK CAPIL	2	3.6 %
Dinas Pemberdayaan Masyarakat	2	3.6 %
Dinas KB dan PP	2	3.6 %
Dinas Perhubungan	1	1.8 %
Dinas Komunikasi dan Informasi	2	3.6 %
Dinas UKM dan PERINDAG	2	3.6 %
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2	3.6 %
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1	1.8 %
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2	3.6 %
Dinas Kepustakaan dan Kearsipan	1	1.8 %
Dinas Perikanan	2	3.6 %
Dinas Pertanian	2	3.6 %
Dinas Pertahanan	1	1.8 %
BAPPELITBANGDA	2	3.6 %
BPPKAD	2	3.6 %
BKD	2	3.6 %
BPBD	2	3.6 %
Kantor Kesbang	1	1.8 %
Kecamatan Gresik	1	1.8 %
Kecamatan Kebomas	1	1.8 %
Dinas Kesehatan	2	3.6 %
Total	56	100 %

(Sumber: Data primer tahun 2019, diolah)

Dari hasil 56 responden yang tersebar dapat terlihat dari kuesioner yang di isi sebanyak 2 responden dari tempat bekerja pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Kabupaten, Dinas Pendidikan,

RSUD, DPU dan Tata Ruang, DPKP, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Lingkungan Hidup, DISPENDUK CAPIL, Dinas KB dan PP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas UKM dan PERINDAG,

Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, BAPPELITBANGDA, BPPKAD, BKD, BPBD, Dinas Kesehatan, serta 1 responden dari tempat bekerja pada Satuan Polisi PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kepustakaan dan Kearsipan, Dinas Pertahanan, Kantor Kesbang, Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas.

**Analisis Data**  
**Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan profil data sampel yang meliputi nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, minimum. Data yang diteliti dikelompokkan 4 yaitu Kompetensi ASN, SPIP, SIKD dan Akuntabilitas Keuangan.

**Tabel 7**  
**Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimu m	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	56	3	5	4.12	.740
X1.2	56	3	5	4.14	.645
X1.3	56	3	5	3.96	.738
X1.4	56	3	5	3.96	.713
X1.5	56	3	5	4.13	.605
X1.6	56	3	5	4.07	.568
X2.1	56	3	5	4.39	.528
X2.2	56	3	5	4.23	.504
X2.3	56	3	5	4.25	.611
X2.4	56	3	5	4.39	.528
X2.5	56	3	5	4.23	.504
X2.6	56	3	5	4.25	.611
X2.7	56	3	5	4.36	.554
X2.8	56	3	5	4.39	.528
X2.9	56	3	5	4.23	.504
X2.10	56	3	5	4.25	.611
X2.11	56	3	5	4.36	.554
X2.12	56	3	5	4.20	.616
X2.13	56	3	5	4.14	.586
X2.14	56	3	5	4.23	.603
X2.15	56	3	5	4.39	.528
X2.16	56	3	5	4.23	.504
X2.17	56	3	5	4.39	.528
X2.18	56	3	5	4.23	.504
X2.19	56	3	5	4.25	.611
X2.20	56	3	5	4.36	.554
X2.21	56	3	5	4.20	.616
X2.22	56	3	5	4.14	.586
X2.23	56	3	5	4.14	.586
X2.24	56	3	5	4.18	.575
X2.25	56	2	4	3.30	.570
X2.26	56	2	4	3.32	.575
X2.27	56	2	4	3.30	.601
X2.28	56	2	4	3.32	.606
X3.1	56	3	5	4.39	.528
X3.2	56	3	5	4.20	.519

X3.3	56	3	5	4.23	.539
X3.4	56	3	5	4.21	.530
X3.5	56	3	5	4.23	.504
X3.6	56	3	5	3.91	.611
X3.7	56	3	5	4.32	.606
Y1.1	56	3	5	4.34	.640
Y1.2	56	3	5	4.29	.624
Y1.3	56	3	5	4.39	.528
Y1.4	56	3	5	4.23	.504
Y1.5	56	3	5	4.39	.562
Y1.6	56	3	5	4.34	.581

(Sumber: Output SPSS 22)

Dari tabel 7 di peroleh hasil dari statistik deskriptif dari seluruh pertanyaan variabel independen (X) yaitu variabel Kompetensi ASN (X1), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2), Sistem Informasi Keuangan Daerah (X3) dan variabel dependen yaitu Akuntabilitas Keuangan (Y).

#### Variabel Kompetensi ASN (X1)

Pertanyaan pertama (X1.1) pada variabel Kompetensi ASN (X1) dari penyebaran kuesioner melalui 56 responden di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai minimum dimana nilai minimum merupakan nilai dari jawaban responden paling rendah yang di jawab oleh responden dengan skala nomor 3 yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dimana nilai maksimum merupakan nilai dari jawaban responden paling tinggi yang di jawab oleh responden dengan skala nomor 5 yaitu sangat setuju (SS), nilai mean merupakan nilai rata-rata dari jawaban keseluruhan responden yang diperoleh nilai mean sebesar 4,12 dan standar deviasi sebesar 0,740. Pertanyaan kedua (X1.2) di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai minimum dengan skala nomor 3 yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dengan skala nomor 5 yaitu sangat setuju (SS), nilai mean sebesar 4,14 dan standar deviasi sebesar 0,645. Pertanyaan ketiga (X1.3) di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai minimum dengan skala nomor 3 yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dengan skala nomor 5 yaitu sangat setuju (SS), nilai mean sebesar 3,96 dan standar deviasi sebesar 0,738. Pertanyaan keempat (X1.4) di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai

minimum dengan skala nomor 3 yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dengan skala nomor 5 yaitu sangat setuju (SS), nilai mean sebesar 3,96 dan standar deviasi sebesar 0,713. Pertanyaan kelima (X1.5) di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai minimum dengan skala nomor 3 yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dengan skala nomor 5 yaitu sangat setuju (SS), nilai mean sebesar 4,13 dan standar deviasi sebesar 0,605. Pertanyaan keenam (X1.6) di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai minimum dengan skala nomor 3 yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dengan skala nomor 5 yaitu sangat setuju (SS), nilai mean sebesar 4,07 dan standar deviasi sebesar 0,568.

#### Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2)

Pertanyaan pertama (X2.1) pada variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2) dari penyebaran kuesioner melalui 56 responden di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai minimum dimana nilai minimum merupakan nilai dari jawaban responden paling rendah yang di jawab oleh responden dengan skala nomor 3 yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dimana nilai maksimum merupakan nilai dari jawaban responden paling tinggi yang di jawab oleh responden dengan skala nomor 5 yaitu sangat setuju (SS), nilai mean merupakan nilai rata-rata dari jawaban keseluruhan responden yang diperoleh nilai mean sebesar 4,39 dan standar deviasi sebesar 0,528. Pertanyaan kedua (X2.2) di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai minimum dengan skala nomor 3 yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dengan

skala nomor 5 yaitu sangat setuju (SS), nilai mean sebesar 4,23 dan standar deviasi sebesar 0,504. Pertanyaan ketiga (X2.3) di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai minimum dengan skala nomor 3 yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dengan skala nomor 5 yaitu sangat setuju (SS), nilai mean sebesar 4,25 dan standar deviasi sebesar 0,611. Pertanyaan keempat (X2.4) di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai minimum dengan skala nomor 3 yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dengan skala nomor 5 yaitu sangat setuju (SS), nilai mean sebesar 4,39 dan standar deviasi sebesar 0,528. Pertanyaan kelima (X2.5) di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai minimum dengan skala nomor 3 yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dengan skala nomor 5 yaitu sangat setuju (SS), nilai mean sebesar 4,23 dan standar deviasi sebesar 0,504. Pertanyaan keenam (X2.6) di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai minimum dengan skala nomor 3 yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dengan skala nomor 5 yaitu sangat setuju (SS), nilai mean sebesar 4,25 dan standar deviasi sebesar 0,611. Pertanyaan ketujuh (X2.7) di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai minimum dengan skala nomor 3 yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dengan skala nomor 5 yaitu sangat setuju (SS), nilai mean sebesar 4,36 dan standar deviasi sebesar 0,554. Pertanyaan kedelapan (X2.8) di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai minimum dengan skala nomor 3 yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dengan skala nomor 5 yaitu sangat setuju (SS), nilai mean sebesar 4,39 dan standar deviasi sebesar 0,528. Pertanyaan kesembilan (X2.9) di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai minimum dengan skala nomor 3 yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dengan skala nomor 5 yaitu sangat setuju (SS), nilai mean sebesar 4,23 dan standar deviasi sebesar 0,504. Pertanyaan kesepuluh (X2.10) di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai minimum dengan skala nomor 3 yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dengan skala nomor 5 yaitu sangat setuju (SS), nilai mean sebesar 4,25 dan standar deviasi sebesar 0,611. Pertanyaan kesebelas (X2.11) di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai

minimum dengan skala nomor 3 yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dengan skala nomor 5 yaitu sangat setuju (SS), nilai mean sebesar 4,36 dan standar deviasi sebesar 0,554. Pertanyaan keduabelas (X2.12) di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai minimum dengan skala nomor 3 yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dengan skala nomor 5 yaitu sangat setuju (SS), nilai mean sebesar 4,20 dan standar deviasi sebesar 0,616. Pertanyaan ketigabelas (X2.13) di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai minimum dengan skala nomor 3 yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dengan skala nomor 5 yaitu sangat setuju (SS), nilai mean sebesar 4,14 dan standar deviasi sebesar 0,586. Pertanyaan keempatbelas (X2.14) di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai minimum dengan skala nomor 3 yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dengan skala nomor 5 yaitu sangat setuju (SS), nilai mean sebesar 4,23 dan standar deviasi sebesar 0,603. Pertanyaan kelimabelas (X2.15) di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai minimum dengan skala nomor 3 yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dengan skala nomor 5 yaitu sangat setuju (SS), nilai mean sebesar 4,39 dan standar deviasi sebesar 0,528. Pertanyaan keenambelas (X2.16) di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai minimum dengan skala nomor 3 yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dengan skala nomor 5 yaitu sangat setuju (SS), nilai mean sebesar 4,23 dan standar deviasi sebesar 0,504. Pertanyaan ketujuhbelas (X2.17) di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai minimum dengan skala nomor 3 yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dengan skala nomor 5 yaitu sangat setuju (SS), nilai mean sebesar 4,39 dan standar deviasi sebesar 0,528. Pertanyaan kedelapanbelas (X2.18) di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai minimum dengan skala nomor 3 yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dengan skala nomor 5 yaitu sangat setuju (SS), nilai mean sebesar 4,23 dan standar deviasi sebesar 0,504. Pertanyaan kesembilanbelas (X2.19) di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai minimum dengan skala nomor 3 yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dengan skala nomor 5 yaitu sangat setuju (SS), nilai mean sebesar 4,25 dan standar deviasi sebesar

0,611. Pertanyaan kedua puluh (X2.20) di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai minimum dengan skala nomor 3 yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dengan skala nomor 5 yaitu sangat setuju (SS), nilai mean sebesar 4,36 dan standar deviasi sebesar 0,554. Pertanyaan kedua puluh satu (X2.21) di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai minimum dengan skala nomor 3 yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dengan skala nomor 5 yaitu sangat setuju (SS), nilai mean sebesar 4,20 dan standar deviasi sebesar 0,616. Pertanyaan kedua puluh dua (X2.22) di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai minimum dengan skala nomor 3 yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dengan skala nomor 5 yaitu sangat setuju (SS), nilai mean sebesar 4,14 dan standar deviasi sebesar 0,586. Pertanyaan kedua puluh tiga (X2.23) di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai minimum dengan skala nomor 3 yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dengan skala nomor 5 yaitu sangat setuju (SS), nilai mean sebesar 4,14 dan standar deviasi sebesar 0,586. Pertanyaan kedua puluh empat (X2.24) di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai minimum dengan skala nomor 3 yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dengan skala nomor 5 yaitu sangat setuju (SS), nilai mean sebesar 4,18 dan standar deviasi sebesar 0,575. Pertanyaan kedua puluh lima (X2.25) di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai minimum dengan skala nomor 2 yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dengan skala nomor 4 yaitu sangat setuju (SS), nilai mean sebesar 3,30 dan standar deviasi sebesar 0,570. Pertanyaan kedua puluh enam (X2.26) di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai minimum dengan skala nomor 2 yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dengan skala nomor 4 yaitu sangat setuju (SS), nilai mean sebesar 3,32 dan standar deviasi sebesar 0,575. Pertanyaan kedua puluh tujuh (X2.27) di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai minimum dengan skala nomor 2 yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dengan skala nomor 4 yaitu sangat setuju (SS), nilai mean sebesar 3,30 dan standar deviasi sebesar 0,601. Pertanyaan kedua puluh delapan (X2.28) di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai minimum dengan skala nomor 2

yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dengan skala nomor 4 yaitu sangat setuju (SS), nilai mean sebesar 3,32 dan standar deviasi sebesar 0,606.

### **Variabel Sistem Informasi Keuangan Daerah (X3)**

Pertanyaan pertama (X3.1) pada variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (X3) dari penyebaran kuesioner melalui 56 responden di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai minimum dimana nilai minimum merupakan nilai dari jawaban responden paling rendah yang di jawab oleh responden dengan skala nomor 3 yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dimana nilai maksimum merupakan nilai dari jawaban responden paling tinggi yang di jawab oleh responden dengan skala nomor 5 yaitu sangat setuju (SS), nilai mean merupakan nilai rata-rata dari jawaban keseluruhan responden yang diperoleh nilai mean sebesar 4,39 dan standar deviasi sebesar 0,528. Pertanyaan kedua (X3.2) di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai minimum dengan skala nomor 3 yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dengan skala nomor 5 yaitu sangat setuju (SS), nilai mean sebesar 4,20 dan standar deviasi sebesar 0,519. Pertanyaan ketiga (X3.3) di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai minimum dengan skala nomor 3 yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dengan skala nomor 5 yaitu sangat setuju (SS), nilai mean sebesar 4,23 dan standar deviasi sebesar 0,539. Pertanyaan keempat (X3.4) di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai minimum dengan skala nomor 3 yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dengan skala nomor 5 yaitu sangat setuju (SS), nilai mean sebesar 4,21 dan standar deviasi sebesar 0,530. Pertanyaan kelima (X3.5) di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai minimum dengan skala nomor 3 yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dengan skala nomor 5 yaitu sangat setuju (SS), nilai mean sebesar 4,23 dan standar deviasi sebesar 0,504. Pertanyaan keenam (X3.6) di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai minimum dengan skala nomor 3 yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dengan skala nomor 5 yaitu sangat setuju

(SS), nilai mean sebesar 3,91 dan standar deviasi sebesar 0,611.

### Variabel Akuntabilitas Keuangan (Y)

Pertanyaan pertama (Y.1) pada variabel Akuntabilitas Keuangan (Y) dari penyebaran kuesioner melalui 56 responden di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai minimum dimana nilai minimum merupakan nilai dari jawaban responden paling rendah yang di jawab oleh responden dengan skala nomor 3 yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dimana nilai maksimum merupakan nilai dari jawaban responden paling tinggi yang di jawab oleh responden dengan skala nomor 5 yaitu sangat setuju (SS), nilai mean merupakan nilai rata-rata dari jawaban keseluruhan responden yang diperoleh nilai mean sebesar 4,34 dan standar deviasi sebesar 0,640. Pertanyaan kedua (Y.2) di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai minimum dengan skala nomor 3 yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dengan skala nomor 5 yaitu sangat setuju (SS), nilai mean sebesar 4,29 dan standar deviasi sebesar 0,624. Pertanyaan ketiga (Y.3) di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai minimum dengan skala nomor 3 yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dengan skala nomor 5 yaitu sangat setuju (SS), nilai mean sebesar 4,39 dan standar deviasi sebesar 0,528. Pertanyaan keempat (Y.4) di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai minimum dengan skala nomor 3 yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dengan skala nomor 5 yaitu sangat setuju (SS), nilai mean sebesar 4,23 dan standar deviasi sebesar 0,504. Pertanyaan kelima (Y.5) di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai minimum dengan skala nomor 3 yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dengan skala nomor 5 yaitu sangat setuju (SS), nilai mean sebesar 4,39 dan standar deviasi sebesar 0,562. Pertanyaan keenam (Y.6) di dapat hasil dari jawaban responden dengan nilai minimum dengan skala nomor 3 yaitu kurang setuju (KS), nilai maksimum dengan skala nomor 5 yaitu sangat setuju (SS), nilai mean sebesar 4,34 dan standar deviasi sebesar 0,581.

### Pembahasan

#### Pengaruh Kompetensi ASN (X1) berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan

Hasil pengujian terhadap hipotesis pertama ( $H_1$ ) menunjukkan bahwa Kompetensi ASN berpengaruh secara positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini karena semakin meningkatnya Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan meningkatnya juga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia yang memiliki arti bahwa setiap personal Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pribadi yang siap, mau dan mampu dalam memberikan berbagai ide keilmuan untuk pencapaian tujuan organisasi. Ide keilmuan ini berasal dari tiga aspek yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap. Sesuai dengan Keputusan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 Tanggal 18 Juni 2011 disebutkan bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan. Untuk menjamin obyektifitas, keadilan, dan transparansi pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dan guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta menjamin keberhasilan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, perlu ditetapkan Standar Kompetensi Jabatan. Kompetensi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan kemampuan seorang individu pada suatu organisasi atau bisa juga pada suatu sistem yang dipergunakan supaya bisa melaksanakan berbagai tugas yang menjadi kewenangannya untuk mencapai kinerja. Kinerja yang dimaksud adalah terkait akuntabilitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah. Ketika kompetensi pada SDM yang dimiliki oleh setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) baik maka akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah dapat tercapai. Akuntabilitas didalamanya

pengelolaan keuangan daerah dapat diwujudkan dengan kualitas sumber daya manusia yang handal, dalam pengukuran tingkat keberhasilan suatu organisasi supaya bisa tercapai dalam visi dan misi sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian dukungan sumber daya manusia yang berkompetensi, yaitu mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap yang cukup memadai sangat diperlukan terselenggaranya akuntabilitas.

### **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2) berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan**

Hasil pengujian terhadap hipotesis kedua (H<sub>2</sub>) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah akan meningkatnya juga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah. Ketika Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dapat dilaksanakan dengan baik, maka setiap proses terkait pelaporan keuangan pada pemerintah daerah dapat terlaksanakan dengan baik. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah dapat membuat laporan keuangan daerahnya lebih berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah. Namun, jika Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada pemerintah daerah tidak dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada, maka pelaporan keuangan yang dihasilkan tidak dapat memberikan kualitas pelaporan yang baik dan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah akan menurun. Sistem Pengendalian Intern yang baik dalam suatu organisasi akan mampu menciptakan keseluruhan proses kegiatan yang baik pula, sehingga nantinya akan memberikan suatu keyakinan bagi organisasi bahwa aktivitas

yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, dan hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi kinerja organisasi tersebut. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah perlu diciptakannya sistem pengendalian intern pemerintah agar instansi pemerintah dapat mengetahui dana publik yang digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 pasal 18, kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian intern terdiri atas review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 pasal 2 menyatakan bahwa Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

### **Sistem Informasi Keuangan Daerah (X3) berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan**

Hasil pengujian terhadap hipotesis ketiga (H<sub>3</sub>) menunjukkan bahwa Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan

Daerah akan meningkatnya juga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah sangat penting di dalam pengelolaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi. Selain itu, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah merupakan sistem pendokumentasikan, pengadministrasikan serta pengolahan data pengelolaan keuangan daerah serta bisa sebagai informasi yang disajikan pada masyarakat yang bisa dipergunakan pengambilan keputusan pada sebuah pelaksanaan, perencanaan, dan pelaporan pada pertanggungjawaban pemerintah daerah. Ketika Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dapat dilaksanakan dan dijalankan dengan baik maka hal ini dapat meningkatkan kualitas pelaporan dan akuntabilitas keuangan daerah. Pemerintah daerah sebuah organisasi publik sehingga perlu adanya dukungan pada sistem informasi akuntansi supaya bisa berjalan secara efektif, bersih, efisien, serta transparansi sehingga bisa dipergunakan dalam pengendalian sebuah keputusan. Pemanfaatan pada sistem informasi akuntansi keuangan daerah dipengelolaan keuangan daerah dilaksanakan pada sebuah pemanfaatan program informasi teknologi dalam mendukung sistem informasi keuangan daerah. Sesuai dengan UU No 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pusat maupun Pemerintah Daerah bahwa dengan adanya sebuah dukungan dari Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagai penunjang perumusan dalam kebijakan fiskal yang secara nasional. Untuk penyajian laporan keuangan yang baik, sehingga dapat meningkatkan laporan keuangan pemerintah daerah. Ada hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi keuangan, agar informasi dapat disampaikan secara tepat, cepat, dan akurat untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Maka perlu adanya suatu sistem informasi yang baik untuk penyampaian dan

penyusunan laporan keuangan tersebut, sehingga penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah dapat sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Sistem informasi akuntansi keuangan daerah sebagai suatu sistem informasi yang dapat membantu dalam penyajian dan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Jika kualitas sistem informasi berjalan dengan baik, maka semua proses akan berjalan dengan lancar, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas yang baik. Dengan adanya fasilitas jaringan sistem informasi akuntansi yang dirancang khusus untuk proses penyusunan laporan keuangan mulai dari pencatatan jurnal, buku besar sampai kepada laporan keuangan semua telah tersistem dengan menggunakan komputerisasi akan mengurangi tingkat kesalahan dalam perhitungan dan menghemat waktu dalam proses penyusunannya. Dengan demikian diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi informasi yang diharapkan dan mampu meningkatkan kualitas hasil dan tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) berpengaruh secara positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan meningkatnya juga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Atas hasil penelitian ini mendukung penelitian tentang Kompetensi ASN terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan Khairunsyah dan Efni (2018) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian hipotesis pada penelitian ini diterima.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah akan meningkatnya juga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Atas hasil penelitian ini mendukung penelitian tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan Dharmaningtyas (2016) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa Efektivitas Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan. Dengan demikian hipotesis pada penelitian ini diterima.

3. Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya Sistem Informasi Keuangan Daerah akan meningkatnya juga Akuntabilitas Keuangan. Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah akan meningkatnya juga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Atas hasil penelitian ini mendukung penelitian tentang Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan Sinarwati (2014) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis pada penelitian ini diterima.

Berdasarkan kesimpulan diatas adalah apa yang telah dihasilkan dari penelitian ini terkait dengan Akuntabilitas Keuangan. Implikasi hasil penelitian yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, supaya bisa dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta

efisien dan efektif. Oleh karena itu setiap pemerintah daerah supaya bisa meningkatkan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Sistem Informasi Keuangan Daerah supaya bisa meningkatkan kualitas pelaporan dan akuntabilitas keuangan. Dalam penelitian ini ada beberapa keterbatasan, yaitu:

1. Pada saat kuisioner dilaksanakan beberapa Perencanaan Anggaran dan Keuangan sedang penyusunan RKA tapi masih dapat meluangkan untuk mengisi kuisioner sehingga dapat terisi seluruh kuisioner yang diberikan.
2. Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten ada 48, untuk pelaksanaan penelitian hanya 32 karena keterbatasan waktu.
3. Variabel independen yang digunakan terbatas pada Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Sistem Informasi Keuangan Daerah diharapkan dapat menambah variabel yang mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andriani W. 2010. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan). *Jurnal Akuntansi & Manajemen*.
- Abdul R. 2009. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol 9*.
- Abdullah dan Halim. A. 2006. Hubungan Masalah keagenan di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*.
- Asriani A. 2017. Pengaruh Elemen-Elemen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal*

- Akuntansi Universitas Hasanuddin.*
- Asmara, J. A. 2010. Analisis Perubahan Alokasi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi.*
- Armando. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi* no.1 vol.1.
- Bastian I., 2002. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar.* Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Dharmaningtyas D. 2016. Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.*
- Dyastiarini. 2015. Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Universitas Hasanuddin.*
- Evicahyani. 2016. Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.*
- Ella S. J. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik.* PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Febrianto L. 2016. Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Lembaga Administrasi Negara Dalam Pengembangan Aparatur Sipil Negara Di Kota Makassar. *Jurnal Hukum Universitas Hasanuddin.*
- Fitrianti A. P. 2017. Pengaruh Pengawasan, Kompetensi dan Lingkungan Kerja Fisik terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang. *Jurnal Manajemen. Universitas Bangka Belitung.*
- Ghozali I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.* Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Ghozali I. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.* Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.* Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Halim.A. 2002. *Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta: Salemba Empat.
- Halim. A. 2007. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah.* UPPSTIMYKPN: Yogyakarta.
- Hardyansyah. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Polewali Mandar). *Jurnal Akuntansi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.*
- Hutapea, P. T. 2008. *Kompetensi Plus, Teori, Desain, Kasus dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Indrawati N. 2017. Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Pertanahan Kota Kendari. *Jurnal Manajemen Universitas Halu Oleo.*
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
- Khairunsyah dan Yulia Efni. 2018. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, kompetensi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dimediasi oleh komitmen organisasi (studi pada organisasi perangkat daerah kabupaten kampar. *jurnal tepak manajemen bisnis, Vol. X (1).*
- Komarasari. 2016. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Universitas Lampung.*
- Lane. 2003. *Management and public organization: The principal-agent*

- framework*. University of Geneva and National University of Singapore. *Working paper*.
- Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN). Badan Keahlian DPR RI. 2017. Akuntabilitas dan Dinamika Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta
- Pertiwi. 2016. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mewujudkan Good Governance pada Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 tahun 2011 Tentang pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan daerah. Diundangkan tanggal 9 Desember 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Diundangkan tanggal 9 Desember 2005 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Diundangkan tanggal 28 Agustus 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Diundangkan tanggal 21 April 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80. Jakarta.
- Moehariono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo. 2006. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Nurmuthmainnah. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Rahadi. 2007. *Peranan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Pelayanan di Sektor Publik*. Disampaikan dalam Seminar Nasional Teknologi 2007 (SNT 2007), Yogyakarta: ISSN: 1978 - 9777.
- Rianisanti. 2017. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi pada SKPD Kabupaten Klaten). *Jurusan Akuntansi Institut Agama Islam Negeri Surakarta*.
- Siahaan A. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon. *Jurnal Akuntansi Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Saleba S. N. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Universitas Hasanuddin*.
- Sastradipoera .K. 2005. *Mencari Makna di Balik Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung : Kappa Sigma.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.
- Santoso.S. 2002. *Statistik Parametrik*. Edisi ketiga. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka;
- Syam.H. 2015. Pengaruh kompetensi dan pemanfaatan teknologi terhadap nilai informasi Dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai variable intervening (studi pada pemerintah kabupaten pinrang). *Jurnal Akuntansi Universitas hasanuddin*.
- Steccolini.I. 2002. *Local Government Annual Report: an Accountability Medium*, EIASM Conference on Accounting

- and Auditing in Public Sector Reforms, September 2002. Dublin.
- Utomo. 2017. Pengaruh Kompetensi dan Pengalaman Dalam Mengelola Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dengan Etika Sebagai variable Moderating (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka). *Jurnal Akuntansi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara*. Diundangkan tanggal 5 April 2003 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286. Jakarta.
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang *Perbendaharaan Negara*. Diundangkan tanggal 14 Januari 2004 .Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Jakarta.
- Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang *Aparatur Sipil Negara*. Diundangkan tanggal 15 Januari 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Jakarta.
- Undang - Undang nomor 33 tahun 2004 Tentang *perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah*. Jakarta.
- Wilkinson. 2000. *Accounting Information Systems: Essential Concepts and Applications*. 4 th edition .John Wiley and Sons. The U.S.A.
- Wibowo. 2011. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wibowo. 2013. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zulganef. 2006. *Konsep Persamaan Struktural dan Aplikasinya Menggunakan AMOS 5*. Bandung: Penerbit Pustaka.